

## **ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN WAKU LANI DESA LENEK DUREN DAN DESA TOYA LOMBOK TIMUR**

### *ANALYSIS INSTITUTIONAL CAPACITY OF FOREST FARMER GROUP WAKU LANI TOYA AND LENEK DUREN VILLAGE LOMBOK TIMUR*

**Lutfia Azizah, Andi Chairil Ichsan, Kornelia Webliana**

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

JL. Pemuda, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram.

Nusa Tenggara Barat 83114

E-mail : [lutfiaazizah2805@gmail.com](mailto:lutfiaazizah2805@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The Waku Lani forest farmer group is a group which is under the management of the Mount National Park Rinjani this group has an institutional capacity not yet optimal. For upgrade capacity the institutional strategy needed to strengthen management institutional. With forestry number 57 of 2014 and Ostrom Theory (1990) to analyze institutional capacity and analysis SWOT to study group strengthening strategies. Method in this study using the interview method, literature observations and studies. Based on research institutional capacity is carried out in the class category beginner with a score of 210 based forestry number 57 of 2014 and institutional performance in the low category with a score of 13 based on the theory Ostrom (1990) this shows that several indicators need to be optimized through a strengthening strategy for increase group institutional capacity. Strategy what is done is to strengthen institutions through capacity building for group dynamics.*

**Keywords :** *National Park; Institutional, Strategy, Group Dynamic.*

**ABSTRACT.** Kelompok tani hutan Waku Lani merupakan kelompok yang berada dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kelompok ini memiliki kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya dibutuhkan strategi penguatan pengelolaan kelembagaan. Dengan menggunakan aturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 57 Tahun 2014 dan Teori Ostrom (1990) untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dan analisis SWOT untuk mengkaji strategi penguatan kelompok. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kapasitas kelembagaan dalam kategori kelas pemula dengan skor 210 berdasarkan aturan Menteri Kehutanan Nomor. 57 Tahun 2014 dan kinerja kelembagaan dalam kategori rendah dengan skor 13 berdasarkan Teori Ostrom (1990). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa indikator perlu dioptimalkan melalui strategi penguatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok. Strategi yang dilakukan yaitu memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dinamika kelompok.

**Kata Kunci :** *Taman Nasional, Kelembagaan, Strategi, Dinamika Kelompok.*

## **PENDAHULUAN**

Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan konservasi yang secara administratif berada dalam tiga wilayah kabupaten (Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur) dengan total luas wilayah mencapai 41.330 ha berdasarkan SK.298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005. Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora dan faunanya serta fenomena alam yang dapat dijadikan sumber plasma nutfah dan keindahan alam yang dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam. Disamping potensi yang dimilikinya, Taman Nasional Gunung Rinjani juga memiliki permasalahan yaitu permasalahan perambahan, konflik, pencurian kayu dan perburuan liar baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun yang dilakukan oleh masyarakat disekitar maupun diluar kawasan.

Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan tersebut adalah dengan pendekatan kolaborasi (Ichsan AC, 2016). Pendekatan kolaborasi adalah kerjasama dua pihak untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Taman Nasional

Gunung Rinjani bekerja sama dengan masyarakat desa Toya dan desa Lenek Duren dengan membentuk Kelompok Tani Hutan yang diberi nama Waku Lani. Kelompok ini memanfaatkan dan memungut HHBK di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani khususnya di zona tradisional. Meskipun demikian, kelompok ini akan membantu pihak pengelola dalam pengembangan kawasan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas kelompok tidak hanya diukur dalam memanfaatkan hasil hutan, tetapi bagaimana peran kelompok dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas kelembagaannya. Untuk dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan diperlukan aturan.

Aturan tersebut berupa aturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 tentang pembinaan untuk peningkatan kemampuan kelompok dan teori ostrom (1990) yang mengedepankan prinsip-prinsip dalam sebuah kelembagaan yang dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Aturan tersebut memegang peranan penting dalam proses evaluasi dan menjamin keberlanjutan kapasitas kelembagaan kelompok tani. Meskipun berada dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani, namun dalam kelembagaannya kelompok tani hutan waku lani belum optimal dilakukan. Dengan demikian, kajian terkait kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan menjadi penting dan menarik untuk dilakukan penelitian, dalam rangka mendeskripsikan kondisi dan pengelolaan kapasitas kelembagaan berdasarkan aturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 tentang pembinaan untuk peningkatan kemampuan kelompok dan teori ostrom (1990), serta strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan berdasarkan analisis SWOT.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Zona Tradisional Wilayah Kerja Resort Aikmel Taman Nasional Gunung Rinjani Desa Lenek Duren, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2020. Objek dan unit analisisnya dalam penelitian ini adalah kapasitas kelembagaan KTH Waku lani dan alatnya yaitu alat tulis, kamera, dan kuisioner. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode kombinasi. Metode kombinasi yaitu menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, *valid*, *reliabel*, dan *obyektif* (Sugiyono, 2013).

Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono. 2017). Penelitian ini dilakukan di Desa Lenek Duren dan Desa Toya Kecamatan Lenek. Alasan penelitian dilakukan di Desa Lenek Duren dan Desa Toya Kecamatan Lenek adalah karena Desa Lenek Duren merupakan berkerja sama dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani melalui kemitraan konservasi.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrumen pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan (Ichsan AC 2019). Responden dalam penelitian ini adalah KTH Waku Lani yang terdiri dari 2 Desa yaitu Desa Toya dan Desa Lenek Duren. Beberapa orang responden dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang ungkapkan oleh Bungin (2003) yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah metode yang mulanya kecil kemudian membesar yang semakin lama jumlah sampel semakin besar samapi dengan sampel tersebut dianggap dapat mewakili unsur yang diteliti dan data yang diperoleh jenuh (Nursiyono, 2014). Informan dalam penelitian ini adalah anggota KTH Waku Lani.

Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit

atau kecil (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yakni peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berupa kuisioner dengan narasumbernya yaitu KTH Waku Lani. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2013). Studi kepustakaan yang dilakukan berupa analisis dokumen KTH Waku Lani. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan berupa mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KTH Waku Lani.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin, 2004). Data primer meliputi hasil wawancara yang dilakukan terkait kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dari berbagai instansi atau lembaga terkait yang relevan dengan penelitian dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Saifuddin, 2004). Data sekunder meliputi kondisi dan profil kawasan, peta kawasan, data kelembagaan dan data anggota KTH Waku Lani.

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 57 Tahun 2014. Dalam mengetahui kapasitas kelompok tani Waku Lani perlu adanya pengetahuan dalam pengelolaan kelembagaan sebagai tolak ukur kemampuan sumber daya manusia :

1. Kelola kelembagaan yaitu hal – hal yang berkaitan dengan administrasi kelompok
2. Kelola kawasan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan kelompok dalam mengelola kawasan
3. Kelola usaha yaitu hal – hal yang berkaitan dengan kapasitas kelompok dalam mengelola usaha.

Berdasarkan Teori Ostrom (1990) analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kelembagaan tersebut mengacu pada delapan prinsip kelembagaan yang berkelanjutan Ostrom (1990), kedelapan prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut (Ichsan, 2017) :

1. Mendefinisikan batasan secara jelas. Batasan pada sistem sumberdaya dan pada sejumlah individu terutama berkaitan dengan hak dan tanggung jawab untuk menggunakan sumberdaya hutan.
2. Proporsional antara keuntungan dan biaya. Aturan yang mengatur distribusi biaya dan manfaat atas sumberdaya hutan termasuk aturan tenaga kerja, material dan uang.
3. Merancang pilihan kolektif. Menyangkut intensitas partisipasi dalam memodifikasi aturan operasional.
4. Monitoring. Aturan yang mengatur proses Monitor terhadap aktivitas dalam PSDH atau monitoring terhadap mereka sendiri.
5. Mekanisme sanksi. Menyangkut pengaturan tentang pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan operasional.
6. Mekanisme resolusi konflik. Menyangkut mekanisme penyelesaian sengketa/konflik PSDH baik di internal masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.
7. Pengakuan terhadap hak untuk mengelola. Pengaturan yang mengakui hak masyarakat untuk merencanakan kelembagaan mereka sendiri tidak ditolak oleh otoritas pemerintahan secara eksternal.
8. Nested enterprises. Menyangkut keterkaitan antara aturan operasional, aturan kolektif dan aturan konstitusional (*Appropriation, provisi, monitoring, penegakan hukum, resolusi konflik, dan aktivitas pemerintah dalam mengorganisasikan multiple layer pada nested enterprises*).

Analisis data dalam penelitian ini ada dua yaitu dilakukan dengan *system scoring* berdasarkan Peraturan Menteri No. 57 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yaitu:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| a. di bawah 350 | : Kelas Pemula |
| b. 350 - 700    | : Kelas Madya  |
| c. Di atas 700  | : Kelas Utama  |

Dilakukan dengan mengadopsi model perhitungan *skala likert* (Sugiono, 2008) dengan gradasi 1 sampai 3 dimana :

1 = Kurang Baik, 2 = Cukup Baik Cukup, 3 = Baik. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, dan dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu :

1. Kinerja kelembagaan tinggi apabila memperoleh nilai = 18.01 – 24.00
2. Kinerja kelembagaan sedang apabila memperoleh nilai = 13.01 – 18.00
3. Kinerja kelembagaan rendah apabila memperoleh nilai = 08.00 – 13.00

Strategi kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani menggunakan strategis analisis

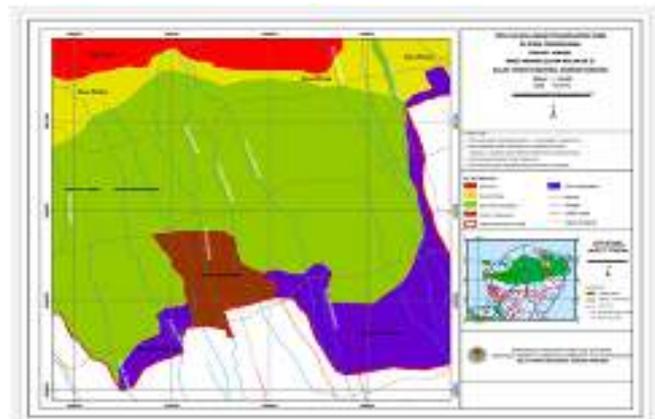
SWOT. Menurut Rangkuti (2017) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal pada satu sisi, serta peluang dan ancaman eksternal pada sisi yang lain. Penyusunan strategi SWOT berdasarkan faktor – faktor strategi eksternal dan internal yang ada. Dari analisis SWOT tersebut akan mendapatkan empat strategi yaitu strategi SO (*Strength–Opportunities*), ST (*Strength–Threats*), WO (*Weaknes – Opportunities*) dan WT (*Weaknes – Threats*).

Tabel 1. Matriks SWOT  
Table 1. SWOT Matrix

	<b>Internal</b>	
<b>Ekternal</b>	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weaknesses (W)</b>
<b>Opportunities (O)</b>	Strategi S-O	Strategi W-O
<b>Treaths (T)</b>	Strategi S-T	Strategi W-T

**HASIL dan PEMBAHASAN**

KTH Waku Lani dibentuk pada 7 Agustus 2019 berdasarkan berdasarkan surat keputusan bersama kepala Desa Toya No. 141/16/Ds.TY/2019 dan kepala Desa Lenek Duren No. 141/13/D.LDK/2019. Sebagian besar anggota KTH adalah petani yang beranggotakan 40 orang yang terdiri dari dua wilayah yaitu desa Toya dan desa Lenek Duren. Keanggotakan KTH Waku Lani terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Berikut Struktur kepengurusan KTH Waku Lani. Desa Toya dan desa Lenek Duren terletak di kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Desa Toya memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.458 jiwa dan desa Lenek Duren memiliki 1.581 jiwa. Desa Toya dan desa Lenek Duren berbatasan langsung dengan kawasan TNGR disebelah utara. Hal ini menyebabkan ketergantungan dan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat cukup tinggi dalam memanfaatkan dan memungut HHBK. Luas pemanfaatan yang dilakukan oleh msyarakat seluas 77.97 hektar.



Gambar. Peta Areal Kegiatan Kelompok KTH Waku Lani

Figure. Map of WTH Lani KTH Group Activities

**a. Karakteristik Responden**

Karakteristik anggota KTH Waku Lani meliputi umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.

## 1. Umur Responden

Tabel 2. Umur Responden

Table 2. Age of Respondents

No	Umur (tahun)	Kriteria Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	18 – 30	Awal kedewasaan	3	10 %
2	30 – 60	Pertengahan kedewasaan	27	90 %
3	> 60	Sangat dewasa	0	0
<b>Jumlah</b>			30 orang	100 %

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa umur responden sebagian besar pada rentang umur pertengahan dewasa. Sebagian besar responden sampai dengan umur 60 masih berada pada rentang umur produktif. Umur produktif yaitu umur yang menjadikan responden untuk dapat terlibat secara aktif dalam melakukan berbagai kegiatan (Rimbawati *et al.*, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian Putra *et al.*, (2006) yang menyatakan

bahwa responden yang memiliki umur produktif cenderung memiliki kemampuan fisik yang baik, sehingga dapat melakukan kegiatan secara optimal serta masih dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal melakukan kegiatan usaha tani hutan seperti pemilihan jenis tanaman, penyediaan bibit, penyediaan lahan, serta penanaman dan pemeliharaan.

## 2. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

Table 3. Education Level of Respondents

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	10	33%
2	SD	18	60 %
3	SMP	1	3,3 %
4	SMA	0	0
5	D III	0	0
6	S1	1	3,3 %
<b>Jumlah</b>		30	100 %

Sumber : Data primer diolah 2020

Keterangan :

Tidak Sekolah

SD = Sekolah Dasar

SMP = Sekolah Menengah Pertama

SMA = Sekolah Menengah Atas

D III = Diploma Tiga (ahli madya)

S1 = Sarjana Strata 1

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar pendidikan responden berada pada 60 % di bangku Sekolah Dasar (SD), dapat dikatakan dalam kategori rendah karena hanya mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD). Rendahnya pendidikan disebabkan oleh tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu, jarak tempuh antara desa dengan kota yang

begitu jauh menyebabkan pendidikan hanya terbatas pada Sekolah Dasar (SD) saja. Ini sesuai dengan hasil penelitian Riana *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa jarak tempuh yang jauh, sarana dan prasarana yang kurang memadai di desa tempat para petani, fasilitas pendidikan yang tidak mendukung serta keinginan yang lemah dan biaya pendidikan juga merupakan faktor penghambat tingkat pendidikan yang ada di desa.

### 3. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden

Table 4. Gender of Respondents

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	3	10 %
2	Laki - laki	27	90 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa jumlah anggota kelompok tani hutan waku lani yang lebih mendominasi adalah laki-laki dengan 90 %, Ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kelompok tani. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitriyan (2006) yang menyatakan bahwa anak laki-laki lebih dominan sebagai pekerja dibandingkan dengan anak perempuan. Namun demikian, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh

ketua kelompok tani, menyatakan bahwa pada hakikatnya perempuan tetap ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok tani apabila suami berhalangan hadir maka istrinya yang mewakili suami dalam kegiatan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya peran perempuan dalam pengembangan dan pengelolaan suatu kawasan. Perempuan juga dapat membantu dalam pengelolaan administrasi dan lainnya.

### 4. Pekerjaan Responden

Tabel 5. Pekerjaan Responden

Table 5. Respondents' Work

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pelajar	1	3 %
2	Buruh	5	17 %
3	Petani	17	57 %
4	Wiraswasta	7	23 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data primer diolah 2020

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis pekerjaan yang dilakukan beragam ada yang bekerja menjadi buruh, petani, wiraswasta. Jenis pekerjaan responden sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, pekerjaan yang mendominasi adalah petani mencapai 57 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan anggota kelompok tani pada sektor pertanian/kehutanan di daerah penelitian ini cukup tinggi.

#### b. Kapasitas Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri No. 57 Tahun 2014

##### 1. Kelola Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aspek penting yang harus ada dalam suatu

organisasi. Kelembagaan diartikan sebagai pola tatanan dan pola hubungan yang dapat mengikat satu dengan yang lain. Dalam kepengurusan hutan, kelembagaan dibutuhkan dalam upaya pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Disamping itu, kelembagaan dimaknai dengan aturan dan kebijakan yang mempengaruhi keputusan-keputusan, kemampuan membentuk struktur organisasi, adanya kemampuan lembaga untuk mengelola aktivitas dan mengembangkan prosedur sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah.

Deskripsi mengenai tingkat kelola kelembagaan KTH Waku Lani secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola kelembagaan  
 Table 6. Aspects and indicators of institutional management capacity assessment

No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skor
1	Dasar hukum pendirian Kelompok Tani Hutan	20
2	Kepengurusan	10
3	Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok	10
4	Perencanaan kegiatan kelompok (RKK)	0
5	Keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok	10
6	Pemantauan dan evaluasi kelompok	15
7	Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat (nama KTH, papan informasi, pertemuan, perpustakaan, peta kelola, dll)	10
8	Aturan dalam kelompok yang mengikat	20
9	Kelengkapan administrasi kelompok dibuktikan dengan adanya: buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen, rapat, buku kas, buku tabung, buku simpan pinjam, buku inventaris barang, buku informasi, buku catatan hasil kegiatan	10
10	Frekuensi pertemuan/musyawarah kelompok tani	10
11	Partisipasi dan kehadiran anggota kelompok tani	10
12	Keikutsertaan dan kehadiran anggota kelompok	0
13	Jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota (bidang teknis, kelembagaan, manajemen usaha, administrasi)	0
14	Keterlibatan kelompok tani hutan dalam program pemerintah/LSM/Lembaga lainnya (kegiatan, kampanye, gerakan-gerakan)	0
15	Jumlah kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH	10
16	Jumlah kelompok baru yang terbentuk	10
17	Jumlah PKSM yang terbentuk	0
18	Jumlah kader pemimpin KTH (keterlibatan generasi muda dalam KTH)	15
<b>Total</b>		<b>160</b>

Sumber: P.57/MENHUT-II/2014

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola kelembagaan, KTH Waku Lani memiliki tingkat kelola kelembagaan dalam kategori kelas pemula dengan total skor penilaian yaitu 160. Beberapa indikator tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kelola kelembagaan. Selain sebagai pilar dalam pengelolaan sumber daya hutan, juga sebagai pengembangan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas

kelembagaan. Anantanyu (2009) menyebutkan kapasitas kelembagaan kelompok tani yang optimal ditandai dengan tingginya tingkat pencapaian tujuan, efektivitas fungsi dan peran struktur, inovatif, dan keberlanjutan kelompok tani.

## 2. Kelola Kawasan

Penilaian kapasitas kelembagaan pada aspek dan indikator kemampuan dalam kelola kawasan yang ada di KTH Waku Lani dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7. Aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola kawasan  
 Table 7. Aspects and indicators of assessing the ability to manage the area

No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skor
1	Pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya	30
2	Penataan dan pemetaan wilayah kelola	0
3	Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola	0
4	Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya	0
5	Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi	10
6	Aktifitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis,/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai dll)	0
7	Aktifitas kelompok dalam melakukan konservasi sumber daya hutan (perlindungan mata air, penangkaran flora dan fauna, pemanfaatan jasa lingkungan dll)	0
8	Dampak terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan (terbentuknya kelompok/organisasi peduli kehutanan)	0

9	Dampak terhadap lingkungan (penambahan sumber mata air, pengurusan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan dll)	0
10	Perolehan sertifikat pengolahan hutan lestari (PHBML/SLVK dan lainnya)	0
<b>Total</b>		<b>40</b>

Sumber: P.57/MENHUT-II/2014

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, menunjukkan bahwa penilaian kemampuan kelola kawasan berada pada kategori kelas pemula dengan total skor penilaian yaitu 40. Belum maksimalnya indikator-indikator tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kurangnya ekonomi masyarakat mempengaruhi pengelolaan kawasan. Masyarakat belum mampu memahami arti penting sebuah kawasan, dimana masyarakat memanfaatkan hasil hutan yang ada tanpa tahu dampak yang akan terjadi kedepannya akibat aktivitas yang dilakukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Karim (2017) menyatakan bahwa hambatan internal dalam mengembangkan kesadaran melestarikan lingkungan adalah karena latar belakang ekonomi, pendidikan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak perusakan lingkungan hidup.

### 3. Kelola Usaha

Deskripsi mengenai penilaian kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani dalam kelola usaha dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8. Aspek dan indikator penilaian kemampuan kelola usaha

*Table 8. Aspects and indicators of business management capability assessment*

No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skor
1	Modal awal kelompok	10
2	Pertambahan modal usaha dalam 3 tahun	0
3	Sumber penambahan modal usaha	0
4	Penambahan jenis usaha dalam tiga tahun	0
5	Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha	0
6	Pertambahan kemitraan dengan perjanjian/MoU dalam 3 tahun	0
7	Cakupan tujuan pemasaran hasil usaha kelompok	0
8	Peningkatan pendapatan kelompok	0
9	Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber (instansi teknis, lembaga penelitian)	0
10	Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok	0
<b>Total</b>		<b>10</b>

Sumber : P.57/MENHUT-II/2014

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa kelola usaha berada pada kategori kelas pemula dengan skor penilaian yang diperoleh yaitu 10. Ini menunjukkan bahwa kelola usaha belum mampu memenuhi kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani. Sehingga dibutuhkan pembinaan KTH agar penilaian kapasitas kelembagaan dikatakan baik. Disinilah peran pendamping dibutuhkan dalam pembinaan KTH. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani selaku pengelola dan pendamping KTH Waku Lani masih dirasa belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping.

Ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kelola usaha. Masyarakat hanya memanfaatkan HHBK tanpa mengetahui bagaimana proses produksi dalam mengelola usaha khususnya pada HHBK itu sendiri.

### c. Kapasitas Kelembagaan Berdasarkan Teori Ostrom (1990)

Deskripsi mengenai kinerja kelembagaan kelompok tani Waku Lani secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Hasil Penilaian keberlanjutan kelembagaan kelompok tani Waku Lani  
 Table 9. Results of the Waku Lani farmer group institutional sustainability assessment

Prinsip (Ostrom 1990)	Parameter Penilaian	Nilai
<b>Kejelasan Batas-batas Wilayah dan pengelola Kesesuaian</b>	1. Kejelasan batas pengelolaan	2
	2. Kesesuaian program KTH dengan kondisi ekonomi masyarakat	1
<b>Pengaturan Kolektif Monitoring Penerapan Sanksi</b>	3. Intensitas pertemuan kelompok	2
	4. Proses monitoring secara berkala	2
<b>Mekanisme Resolusi Konflik</b>	5. Mekanisme penerapan sanksi pada pihak pelanggar	1
	6. Keterlibatan stakeholder dalam menangani konflik dan proses penyelesaian sesuai dengan aturan	1
<b>Pengakuan</b>	7. Hak yang diatur dalam KTH mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah	2
<b>Bagian dari Sistem Pengelolaan</b>	8. Keterkaitan antara aturan operasional, kolektif dan kontitusional	2
<b>Total Nilai</b>		<b>13</b>

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

Keterangan: Skor (08.00-13.00) = Rendah, (13.01-18.00) = Sedang, (18.01-24.00) = Tinggi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kapasitas kelembagaan kelompok tani waku lani dengan menggunakan kedelapan prinsip teori ostrom (1990), yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan tergolong dalam kategori kinerja yang rendah dengan nilai perhitungan sebesar 13. Berikut penjelasan kedelapan prinsip teori Ostrom (1990):

#### 1. Kejelasan Batas Pengelolaan

Kejelasan batas-batas wilayah dan pengelolaan organisasi diatur dalam aturan konstitusional dan kolektif dalam bentuk MOU yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban lembaga dalam menjalankan program. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap MOU kelompok tani waku lani, dapat dideskripsikan bahwa kejelasan batas-batas wilayah dan pengelolaan serta hak-hak telah diatur. Batas-batas wilayah dan pengelolaan meliputi areal kegiatan yang berada di zona tradisional dengan memberikan akses pemanfaatan HHBK kepada masyarakat. Selain itu hak-hak yang diberikan berupa akses untuk melakukan pemungutan madu hutan, mendapatkan arahan teknis mengenai pelaksanaan pemanfaatan HHBK di zona tradisional serta mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebagai pendamping dan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

#### 2. Kesesuaian Program KTH dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan kelompok tani dilakukan dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan HHBK di zona tradisional. Pemberian akses pemanfaatan HHBK di zona tradisional merupakan bagian dari pemberdayaan terhadap kelompok dalam mengelola HHBK secara swadaya di luar kawasan hutan sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang baik bagi kehidupan masyarakat.

Pemberian akses pemanfaatan HHBK belum menjamin adanya kehidupan yang layak bagi masyarakat. Menurut salah satu anggota, meskipun kami telah diberikan hak untuk dapat memanfaatkan HHBK, namun hal tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat potensi komoditas HHBK yang dapat dikembangkan dan keterbatasan kemampuan kelompok dalam mengelola komoditas HHBK. Pada kenyataannya, kebijakan yang ada belum efektif mendukung pengelolaan HHBK secara swadaya oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

#### 3. Intensitas Pertemuan Kelompok

Dalam konteks pengaturan kolektif, indikator yang digunakan adalah intensitas pertemuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat digambarkan bahwa intensitas pertemuan sering dilakukan hanya pada saat

awal-awal pembentukan kelompok. Pertemuan tersebut membahas tentang proses perencanaan dan program kerja kelompok, setelah perencanaan dan program kerja telah dirancang dan disusun pertemuan jarang dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang menyebutkan bahwa: "Pertemuan sudah jarang dilakukan karena memiliki kesibukan dan urusan masing-masing".

Dengan adanya intensitas pertemuan kelompok yang jarang, akan berdampak pada tujuan pembentukan KTH Waku Lani. Tujuan yang semula direncanakan untuk perlindungan dan pengawetan flora dan fauna serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu akan mempengaruhi kemampuan kinerja masyarakat dalam mengelola hutan berkurang.

Untuk itu perlu adanya koordinasi antara pengurus dengan anggota kelompok dalam hal tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga akan tercapai kelembagaan dan keefektifan kelompok yang baik. Keefektifan kelompok merupakan keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuannya. Menurut Andarwati (2012) dengan adanya keefektifan kelompok akan menunjukkan tercapainya tujuan kelompok, rasa kebanggaan anggota terhadap kelompoknya, serta rasa puasnya anggota terhadap tujuan yang telah dicapai.

#### 4. Proses Monitoring

Monitoring pelaksanaan kegiatan kelompok telah diatur dalam aturan konstitusional dan aturan kolektif baik dalam bentuk pedoman maupun tertuang secara eksplisit dalam MOU namun demikian dalam prakteknya proses monitoring yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Selama ini pihak Taman Nasional di nilai jarang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. proses monitoring hanya dilakukan diawal-awal pembentukan kelompok dan saat kegiatan dilakukan, hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa : "Selama ini pendamping kelompok dari taman nasional jarang sekali bertemu dengan kami, walaupun datang hanya pada saat berkegiatan saja, itupun kalo mereka tidak sibuk"

Kurangnya monitoring yang dilakukan menyebabkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terbatas dalam mengelola HHBK. Kinerja tidak hanya ditentukan oleh pengaturan pilihan kolektif, tetapi bagaimana aturan yang dibuat itu dapat dikontrol dan

ditegakkan (Ostrom *et a*,.. 1994, Ichsan AC, 2020). Menurut Ostrom (1990) banyak institusi yang bertahan lama karena memiliki biaya monitoring yang murah. Selain itu, Ostrom (2000) menyatakan hanya sedikit sistem sumberdaya yang dapat bertahan lama tanpa ada proses monitoring.

#### 5. Mekanisme Penerapan Sanksi pada Pihak Pelanggar

Dalam penerapan sanksi yang diberikan tidak ada mekanisme sanksi yang mengatur apabila terjadi pelanggaran ataupun penyalahgunaan. Pada MOU tidak jelaskan pula mekanisme sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan. Disisi lain, pada level aturan kolektif dan operasional tidak ada penjabaran mengenai penegasan sanksi tersebut, termasuk kriteria pelanggarannya.

Dengan demikian, jika terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kelompok maka tidak ada mekanisme yang mengatur penyelesaian hal tersebut. Meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan, akan tetapi kelompok tani tetap memiliki mekanisme tersendiri berupa teguran. Teguran yang dimaksud berupa teguran biasa dalam bentuk nasehat, namun apabila melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar aturan kelompok baik tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan maupun melakukan kerusakan terhadap hutan maka akan dilaporkan ke pihak desa dan desa akan menidakanjuti ke pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani selaku *stakeholder* pendamping KTH Waku Lani. Nugroho (2013) menyebutkan penegakan aturan main tanpa penerapan sanksi menyebabkan institusi itu tidak berguna.

#### 6. Mekanisme Resolusi Konflik

Mekanisme penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan tidak diatur secara eksplisit baik dalam aturan konstitusional, kolektif maupun operasional. Mekanisme penyelesaian permasalahan kelompok hanya disebutkan dalam MOU yang menyatakan; apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, apabila penyelesaian perselisihan tidak membawa hasil yang diharapkan maka penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya.

Upaya penanganan resolusi konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah

satunya adalah dengan pengelolaan kolaborasi. Pengelolaan kolaborasi adalah suatu keadaan dua atau lebih aktor-aktor sosial melakukan negosiasi, merumuskan dan membangun kepercayaan antara mereka untuk suatu pembagian yang adil atas fungsi-fungsi pengelolaan, bertanggung jawab terhadap suatu teritori tertentu, wilayah atau sekumpulan sumber daya alam (Borrini *et al.*, 2000). Dengan adanya strategi kolaborasi dapat menjamin penyelesaian konflik.

#### 7. Pengakuan Hak Perlindungan

Dalam level konstitusional pengaturan hak dalam pelaksanaan KTH telah diatur hak masyarakat dalam pemanfaatan HHBK di kawasan Taman Nasional khususnya di zona pemanfaatan. Namun dalam aturan kolektif dan operasional tidak mengatur lebih jauh tentang bentuk dan mekanisme rinci terkait dengan hak masyarakat dalam pemanfaatan wilayah tersebut. Pengaturan kolektif hanya mengatur teknis organisasi pelaksana kegiatan seperti hak dan kewajiban pengurus dan mekanisme koordinasi yang harus dijalankan dalam pelaksanaan kegiatan KTH. Hal tersebut kurang efektif dilaksanakan

karena akan mempengaruhi kelembagaan kelompok. Kelembagaan kelompok tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena aturan yang dibuat hanya sebatas hak dan kewajiban bukan berdasarkan keinginan kelompok. Aturan yang dibuat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi kelompok baik dalam segi ekologi, ekonomi dan sosial. Sehingga pengakuan hak perlindungan baik untuk kelompok maupun kelembagaan terjamin.

#### 8. Keterkaitan antara Aturan Operasional, Kolektif dan Kontitusional

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan yang menjadi mandat pada level konstitusional dan kolektif dijabarkan secara eksplisit dalam aturan operasional pelaksanaan kegiatan KTH. Pelaksanaan KTH menjabarkan aturan kontitusional tersebut di tingkat kolektif dan operasional. Terdapat MOU, struktur yang fungsional, aturan kelembagaan dan mekanisme perencanaan di internal kelompok.

#### d. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani

Tabel 10. Analisis Kekuatan

Table 10. *Strength Analysis*

Faktor Internal	
No	Kekuatan
1.	Memiliki legalitas dalam pembentukan KTH Waku Lani yang ditetapkan melalui surat keputusan bersama kepala desa Toya No. 141/16/Ds. TY/2019 dna kepala desa Lenek Duren No. 141/13/D.LDK/2019
2.	Tersedia areal kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh anggota KTH Waku Lani melalui kemitraan
3.	Dukungan istri untuk ikut terlibat dalam kegiatan KTH Waku Lani menggantikan suami
4.	Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah
5.	Ada figur ketua kelompok yang bisa menjadi panutan
6.	Kuatnya ikatan kekeluargaan dan semangat gotong-royong
7.	Adanya legalitas pemberian akses pemanfaatan dan pemungutan HHBK dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) antara balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan kelompok Waku Lani
8.	Anggota dan pengurus KTH Waku Lani memahami tata batas areal kawasan

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

Tabel 11. Analisis Kelemahan

Table 11. *Weakness Analysis*

Faktor Internal	
No	Kelemahan
1.	KTH Waku Lani belum memiliki sekretariat tetap
2.	Pengurus dan anggota belum ada yang pernah mengikuti program pelatihan dari pemerintah

3.	Tingkat partisipasi kelompok dalam kegiatan kurang karena anggota kelompok fokus pada pekerjaannya masing-masing
4.	Peran anggota kelompok usia muda masih rendah
5.	Belum ada job deskripsi pengurus dan anggota KTH Waku Lani
6.	Jumlah anggota kelompok dari unsur perempuan masih rendah
7.	Frekuensi pertemuan kelompok kurang
8.	Administrasi kelompok kurang lengkap
9.	Kapasitas SDM yang dimiliki oleh anggota dan pengurus minim, karena kebanyakan kelompok hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD
10.	Kurangnya pemahaman pengurus dan anggota KTH Waku Lani dalam manajemen usaha
11.	Kurangnya koordinasi antara anggota dan pengurus

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

Tabel 12. Analisis Peluang  
Table 12. Opportunity Analysis

Faktor Eksternal	
No	Peluang
1.	Adanya peningkatan pendapatan atas pemanfaatan areal kawasan oleh anggota dan pengurus KTH Waku Lani
2.	Terbukanya usaha pengolahan, pelabelan, dan pengemasan madu
3.	Adanya kerjasama kemitraan antara KTH Waku Lani dengan Taman Nasional Gunung Rinjani
4.	Adanya akses pemanfaatan dan pemungutan HHBK
5.	Adanya dukungan dari Taman Nasional Gunung Rinjani dan pemerintah desa
6.	Terbukanya pasar untuk pemasaran HHBK
7.	Adanya pengembangan HHBK
8.	Tingginya permintaan pasar atas HHBK madu
9.	Adanya dukungan anggaran dari Taman Nasional Gunung Rinjani
10.	Ada dukungan dari pemerintah desa dalam pemasaran HHBK

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

Tabel 13. Analisis Ancaman  
Table 13. Threat Analysis

Faktor Eksternal	
No	Ancaman
1.	Eksistensi KTH Waku Lani terganggu oleh kurangnya pembinaan yang tidak dilakukan secara rutin
2.	Sewaktu-waktu akan muncul konflik karena anggota dan pengurus KTH Waku Lani berasal dari dua desa yang berbeda yaitu desa Toya dan desa Lenek Duren
3.	Munculnya arogansi dari anggota kelompok karena belum adanya mekanisme pemberian sanksi
4.	Sulitnya untuk mewujudkan kelompok tani yang maju karena pembinaan yang kurang dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani
5.	Menurunnya tingkat mobilitas dan aksestabilitas karena jarak kedua desa yaitu desa Toya dan desa Lenek Duren yang berjauhan

Sumber : Data primer diolah tahun 2020

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 apabila dikategorikan dalam kelas pemula maka prioritas pembinaan pada aspek kelembagaan, kelas madya dengan prioritas pembinaan pada aspek kawasan dan kelas utama dengan prioritas pembinaan pada

aspek usaha. Berdasarkan analisis yang dilakukan kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani berada pada kategori kelas pemula. Hasil analisis dan deskripsi yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi yang dibutuhkan dalam penguatan kapasitas kelembagaan yaitu :

1. Strategi S-O (*Strength – Oppurnities*)  
Strategi S-O yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan peluang pasar dengan memaksimalkan kerjasama antara pihak Taman Nasional Gunung Rinjani dan anggota KTH Waku Lani dalam mengembangkan HHBK. Kerjasama yang diinginkan berupa dukungan dalam proses pemasaran HHBK sehingga nantinya ada peningkatan pendapatan yang dimiliki oleh kelompok.
2. Strategi S-T (*Strength – Threat*)  
Strategi S-T yang dirumuskan ialah meningkatkan pendampingan melalui monitoring. Pendampingan melalui monitoring yang dilakukan bertujuan untuk melihat keberhasilan kelompok dalam menjalankan program yang telah direncanakan dan disusun guna menghasilkan tujuan yang diinginkan bersama kelompok.
3. Strategi W-O (*Weakness – Oppurnities*)  
Strategi W-O yang dirumuskan yaitu memperkuat kelembagaan melalui peningkatan dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan dan pengembangan sebuah kelompok.
4. Strategi W-T (*Weakness-Threat*)  
Strategi ini merupakan strategi yang bersifat defensif yaitu untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman (Tamara, 2016). Dengan meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman sehingga strategi yang digunakan yaitu mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani kepada anggota KTH Waku Lani. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani akan mempengaruhi eksistensi dan keberlanjutan dari KTH Waku Lani.

## KESIMPULAN dan SARAN

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan Kapasitas kelembagaan yang terdapat pada KTH Waku Lani dari kelola kelembagaan mendapatkan skor 160,

kelola kawasan mendapatkan skor 40 dan kelola usaha mendapatkan skor 10, sehingga total skor yang diperoleh adalah 210, maka KTH Waku Lani termasuk dalam kategori kelas pemula. Sedangkan menurut Teori Ostrom (1990) kinerja kapasitas kelembagaan KTH Waku Lani termasuk dalam kategori rendah dengan skor penilaian yaitu 13.

2. Berdasarkan hasil analisis dalam kapasitas kelembagaan yang dilakukan melalui konsep regulasi dan teori, maka prioritas penanganan yang paling pertama yang harus dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai mitra strategis KTH Waku Lani adalah memperkuat kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dinamika kelompok.

### b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan KTH Waku Lani kedepannya.
2. KTH Waku Lani perlu diperkuat melalui peningkatan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan kapasitas kelembagaan.
3. Perlu adanya koordinasi antara pihak Taman Nasional Gunung Rinjani dan KTH Waku Lani dalam memajukan dan mendukung keberlanjutan program KTH dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan
4. Perlu dilakukannya penelitian sejenis terhadap kelompok lain yang tidak melakukan MOU yang ada di desa Toya dan Desa Lenek Duren.
5. Perlu dimasukkannya penerapan sanksi pada pihak pelanggar dalam perjanjian kerjasama (PKS).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu. 2009. Partisipasi petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok petani. [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Andarwati S., Guntoro B., Haryadi, F.T., Sulastri, E. 2012. Dinamika Kelompok Peternak Sapi Potong Binaan Universitas

- Gajah Mada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sains Peternakan*. 10(1): 39-46.
- Borrini, F., Farvar, J.C., Nguinguri, V.A., Ndangang. 2000. Comanagement of natural resources: organising, negotiating and learning-by-doing [Internet]. [diunduh 12 Mei 2020].
- Bungin B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta (ID): Radja Grafindo.
- Dahuri, R. 2002. Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan. Jakarta (ID): Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia (LIPSI).
- Dahuri, R. 2002. Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan. Jakarta (ID): Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia (LIPSI).
- Ichsan, A. C., Soekmadi, R., Adiwibowo, S., Kusmana, C., & Dramaga, J. L. A. K. I. (2017). Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan model desa konservasi di Taman Nasional Gunung Rinjani. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 47-59.
- Ichsan, A. C., Aji, I. M. L., Webliana, K., & Sari, D. P. (2019, May). The Analysis of Institutional Performance of The Village Conservation Model in Gunung Rinjani National Park. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 270, No. 1, p. 012019). IOP Publishing.
- Ichsan, A. C., Aji, I. M. L., Anwar, H., Waru, T., & Febryano, I. G. (2020). The implementation of conservation village model program in mount Rinjani National Park (A Regulation Perspective). *Ecology, Environment and Conservation*, 26(3), 1100-1109.
- Nugroho, B. 2013. Reformasi kelembagaan dan tata pemerintahan. Faktor Pemungkin Menuju Tata Kelola Kehutanan Yang Baik. In: Kartodihardjo H, editor. *Kembali Ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta (ID) : Nailil Printika.
- Nursiyono, J.A. 2014. Kompas Teknik Pengambilan Sampel. In Media Bogor Jawa Barat. Bogor.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Common: The Evolution of Institution for Collectiveaction*. New York (US): Cambridge University Press.
- Ostrom, E. 2000. Reformulating the commons. *Swiss Political Science Review* 6(1): 29-52. Persada.
- Pitriyan, P. 2006. The Impact of Child Labor on Child's Education: The Case of Indonesia [Internet]. [diunduh pada 12 Mei 2020].
- Putra, I.G.S.A., Asngari, P.S., Tjitropranoto, P. 2006. Dinamika Petani dalam Beragribisnis Salak (Kasus di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali). *Jurnal Penyuluhan*. 2(1): 44-52.
- Rangkuti, F. 2015. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Riana., Purnaningsih, N., Satria, A. 2015. Peranan Penyuluh Swadaya dalam Mendukung Intensifikasi Kakao di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah *Jurnal Penyuluhan*. 11(2): 201-211.
- Saifuddin, A. 2004. *Metode Penelitian*. Cetakan V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabet. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
- Tamara, A. 2016. Implementasi Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 4: 395-406.